



► SEKOLAH RAKYAT

## Pemkab Siapkan Gedung Bekas Sekolah Regrouping

WONOSARI—Kendati merasa kesulitan, Pemkab Gunungkidul terus berupaya mencari lahan seluas lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pemkab berencana memanfaatkan bekas gedung sekolah yang terkena *regrouping* sebagai lokasi sekolah yang digagas Kementerian Sosial tersebut

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta mengaku sudah

menggelar rapat koordinasi guna membahas kelanjutan pembangunan sekolah rakyat. Meski demikian, untuk realisasinya, Pemkab kesulitan menyediakan lahan seluas 5-10 hektare sesuai dengan ketentuan dari Pusat. “Kami tidak punya lahan seluas yang dibutuhkan untuk membangun Sekolah Rakyat,” kata Sri Suhartanta, Selasa (22/4).

Kendati demikian, ia mengaku,

Pemkab tetap mengupayakan agar Sekolah Rakyat tetap bisa dibangun di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu opsi yang dilakukan dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar pembangunannya memanfaatkan bekas sekolah yang terdampak *regrouping*.

“Banyak sekolah yang digabungkan sehingga bekas gedungnya tidak terpakai. Ini yang sedang coba kami usulkan

agar bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat,” kata mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian saat dikonfirmasi tidak menampik adanya opsi memanfaatkan gedung bekas sekolah yang terkena *regrouping* untuk program sekolah rakyat.

Opsi ini dimunculkan karena ada ketentuan di dalam pelaksanaannya dapat menggunakan fasilitas gedung milik pemerintahan yang sudah tersedia. “Tetapi ini masih wacana karena belum diusulkan sehingga belum ada persetujuan dari Kementerian,” katanya.

Menurut Aldian, keberadaan bekas gedung sekolah yang terkena penggabungan juga harus dikaji

secara matang. Peralpnya, banyak aset bekas sekolah ini bukan milik Pemkab sehingga jangan sampai menimbulkan persoalan baru pada saat dimanfaatkan untuk sekolah rakyat. “Butuh dikaji dahulu berkaitan dengan status aset. Kalau milik Pemkab, tidak ada masalah kalau dimanfaatkan. Tetapi, kalau milik perseorangan, maka butuh kajian,” katanya.

(David Kurniawan)